

Pemprov DKI Bakal Tutup Klub Malam Tempat Nongkrong Pengguna Narkoba

JAKARTA (IM) - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta tidak segan menutup dua klub malam di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, yang pada Sabtu (2/12) malam lalu menjadi tempat nongkrong para pengguna narkoba.

Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Parekraf DKI Jakarta, Iffan, mengatakan saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mengonfirmasi penemuan tersebut. "Yang pasti kami tidak ada toleransi. Kami akan tindak tegas apabila tempat industri pariwisata tersebut terbukti ada keterkaitan dengan narkoba. Kami akan tutup sesuai dengan Perhub 18/2018," kata Iffan saat dikonfirmasi, Senin (4/12).

Ia pun akan berkolaborasi dengan para pengusaha tempat hiburan di Jakarta guna menyosialisasikan kembali ketertarikan dalam menjalankan usaha. Pengusaha, sambungnya, harus menjalankan bisnis dengan aman dan patuh pada aturan.

"Pastinya akan kami sosialisasikan terus. Untuk pengawasan sebenarnya berjalan. Tapi untuk meneges narkoba kami tidak ada kewenangan

untuk itu," jelasnya. Ia juga menambahkan pengusaha di Jakarta sebenarnya sudah sangat memahami aturan tentang usaha industri pariwisata di DKI yakni tidak ada toleransi terhadap kejahatan narkoba. Mereka juga sudah mengetahui tentang sanksi pencabutan izin usaha yang disertai penutupan usaha.

"Semuanya sudah memahami. Apalagi penutupan ini bukan yang pertama kali," ucapnya. Sebelumnya, polisi merasa dua tempat hiburan malam di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Ada 9 pengunjung yang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Razia dilakukan Sabtu (2/12) malam hingga Minggu (3/12) pagi.

Petugas gabungan Bareskrim Polri dan Bea Cukai melakukan tes urine yang hasilnya didapatkan sembilan pengunjung positif mengonsumsi narkoba. Penemuan itu hanya berjarak beberapa pekan setelah penutupan bar Kloud Sky Dining & Lounge di Jl Senopati, Jakarta Selatan.

Bar tersebut dicabut izinnya dan ditutup karena saat razia, Bareskrim menemukan pengunjung yang membawa narkoba. ● yan

BPBD Petakan 25 Kelurahan Rawan Banjir di Jakarta

JAKARTA (IM) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memetakan 25 kelurahan di Jakarta rawan banjir, khususnya saat memasuki musim penghujan.

"Kami memetakan ada 25 kelurahan rawan banjir menurut Perhub Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta," kata Kepala Satuan Pelaksana Tugas (Kasatpel) Pengolahan Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Michael Sitanggang, Senin (4/12).

Michael mengatakan 25 kelurahan rawan banjir di Jakarta, meliputi lima kelurahan di Jakarta Barat, yaitu Rawa Buaya, Tegal Alur, Kedoya Selatan, Kedoya Utara dan Kembangan Utara.

Di Jakarta Selatan terdapat sembilan kelurahan, yaitu Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Pondok Pinang, Ulujami, Pondok Labu, Bangka, Pejaten Timur, dan Jati Padang.

Di Jakarta Timur, terdapat delapan kelurahan, yaitu Bidara Cina, Kampung Melayu, Cawang, Cililitan, Cipinang Melayu, Kebon Pala, Makasar, dan Kampung Rambutan. Sementara di Jakarta Utara, meliputi Pademangan Barat, Pluit, dan Rorotan.

Untuk mengantisipasi bencana banjir terutama di wilayah-wilayah tersebut, BPBD DKI menyiapkan sejumlah strategi, seperti menyiapkan 267 petugas penanggulangan bencana di setiap kelurahan di Jakarta.

BPBD DKI juga melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG), wali kota/bupati, dan seluruh pemangku kepentingan untuk penanggulangan bencana.

"BPBD juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan banjir melalui forum pengurangan risiko bencana (PRB) yang terdiri dari lembaga dan institusi penanggulangan bencana lintas sektor," kata Michael.

Selain itu, BPBD juga menyebarkan informasi cuaca terkini dan kondisi tinggi muka air (TMA) kepada masyarakat melalui media sosial. Pihaknya juga melakukan pengecekan sarana prasarana meliputi tenda, perahu, ring buoys, jaket, dan pelampung. ● yan

PENGUMUMAN PEMBUBARAN

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BAYU ENERGY LESTARI, tertanggal 04 Desember 2023, nomor 01, yang dibuat oleh OKI TRIASTUTI, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, telah diputuskan untuk melikwidasi PT. BAYU ENERGY LESTARI, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan menunjuk Direksi perseroan sebagai Likwidatur, kepada para pihak yang berkeberatan atas likwidasi tersebut diatas, dapat mengirimkan surat keberatan dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini, kepada:

DIREKSI
PT. BAYU ENERGY LESTARI
Pondok Indah Plaza III Blok F No. 05,
Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan 12310

UNDANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) Nomor : 001/RUPS/HGS/XII/2023

Dengan ini kami mengundang kepada seluruh Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris PT. Hera Gemilang Surya untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan pada :

Hari / tanggal: Selasa, 19 Desember 2023
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : ITC Cempaka Mas Lantai 9 Nomor 38, Jalan Letjen Suprpto, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Acara : 1. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Merubah pasal 4 anggaran dasar Perseroan (penyesuaian KBLI).

Mengingat pentingnya acara tersebut, maka dimohon kehadiran Saudara pada acara tersebut sesuai waktu yang ditetapkan.
Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direksi
PT. Hera Gemilang Surya

PENGUMUMAN PENAMBAHAN MODAL MELALUI KONVERSI UTANG PT SEMESTA INTEGRASI DIGITAL

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Semesta Integrasi Digital ("Perseroan") No. 2, tanggal 1 Desember 2023, dibuat di hadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham telah menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan menjadi Rp47.276.889.100,- dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi Rp 47.243.346.000,- yang mana sebagian penyetorannya dilakukan dengan konversi utang Perseroan sebesar Rp 8.670.420.000,- menjadi saham Seri B, Rp 8.842.233.000,- menjadi saham Seri C, dan Rp 29.423.287.500,- menjadi saham Seri D, yang diambil bagian oleh para pemegang saham baru.

Pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 5 Desember 2023
PT Semesta Integrasi Digital
South Quarter Tower A, 18th Floor, Jalan Raden Ajeng Kartini Kaveling 8, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan
Direksi

FOTO: ANTARA



Presiden Jokowi Luncurkan Sertifikat Tanah Elektronik di Istana Negara

Dengan diimplementasikannya Sertifikat Tanah Elektronik ini, Presiden Jokowi mengimbau jajaran Kementerian ATR/BPN di seluruh tanah air untuk mensosialisasikan produk tersebut kepada masyarakat luas.

JAKARTA (IM) - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Sertifikat Tanah Elektronik, pada Senin, (4/12). Peluncuran Sertifikat Tanah Elektronik dilakukan di Istana Negara, dengan ditandai penekanan layar oleh Kepala Negara didampingi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto.

Dalam sambutannya, Joko Widodo mengangg

siikan produk tersebut kepada masyarakat luas.

"Tidak hanya di perkotaan tapi juga sampai ke desa-desa di seluruh Indonesia, beri informasi se jelas-jelasnya, sedetail-detailnya agar masyarakat mengerti, tidak bingung," tuturnya.

Presiden Joko Widodo juga mengucapkan selamat dan mengapresiasi langkah Kementerian ATR/BPN yang telah melakukan digitalisasi layanan pertanahan melalui penerapan Sertifikat Tanah Elektronik sebagai implementasi konsep Digital Melayani (DILAN).

Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN melaporkan bahwa sistem keamanan Sertifikat Tanah Elektronik menggunakan sistem block data yang siap diintegrasikan dengan sistem blockchain. Dengan sistem block data, data digital dapat disimpan dengan aman dan dikirimkan tanpa risiko peretasan ataupun manipulasi.

"Sehingga, pemerintah dapat meningkatkan proteksi data pada sertifikat tanah versi elektronik," ucapnya.

"Ke depannya, melalui implementasi sistem blockchain, diharapkan keamanan, autentisitas, dan validitas data sertifikat akan ditingkatkan, sehingga kerahasiaan dan duplikasi data," tambah Menteri ATR/Kepala BPN.

Hadi Tjahjanto mengungkapkan, Sertifikat Tanah Elektronik diterbitkan menggunakan secure document dan disahkan melalui tanda tangan elektronik (TTE), sehingga kerahasiaan dan keamanan data pertanahan dapat terjamin. "Jika diperlukan, dapat diberikan dalam bentuk fisik berupa security paper," terangnya.

Sertifikat Tanah Elektronik juga memberikan kemudahan bagi pemilik sertifikat untuk mendapatkan informasi terkait data sertifikat di mana pun dan kapan saja secara real-time melalui aplikasi Sentuh Tanahku. "Dalam aplikasi Sentuh Tanahku terdapat fitur notifikasi jika terjadi perubahan data dalam Sertifikat Tanah Elektronik," jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan, penerapan Sertifikat Tanah Elektronik diberlakukan secara bertahap, mulai dari sertifikasi aset BMN/BMD, Badan Hukum dan BUMN, rumah ibadah, serta masyarakat di 12 Kabupaten/Kota Lengkap dan

selanjutnya di seluruh wilayah Indonesia. Dengan diimplementasikannya Sertifikat Tanah Elektronik maka Hadi Tjahjanto menyatakan pengelolaan pertanahan di Indonesia telah berstandar dunia.

"Hampir seluruh negara, baik di Benua Eropa, Australia, Amerika, dan Asia telah menggunakan Sertifikat Tanah Elektronik. Sehingga, dengan mengimplementasikan Sertifikat Tanah Elektronik pengelolaan pertanahan di Indonesia telah berstandar dunia dan setara dengan negara lainnya," pungkasi Hadi Tjahjanto.

Dalam kesempatan ini, diserahkan Sertifikat Tanah Elektronik kepada tujuh perwakilan masyarakat dan tiga perwakilan instansi pemerintah. Hadir menerima sertifikat tersebut di antaranya Jaksa Agung, ST Burhanuddin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Turut hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus, Tenaga Ahli, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula 150 masyarakat penerima sertifikat dari sejumlah kabupaten/kota dari Jabodetabek. ● ber

Dinkes DKI Mendata Anak yang Terinfeksi Pneumonia di Jakarta

JAKARTA (IM) - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan, pihaknya tengah mendata jumlah anak di Ibu Kota yang terinfeksi mycoplasma pneumoniae. Langkah itu dilakukan setelah Dinkes DKI Jakarta menerima laporan terkait adanya anak terinfeksi bakteri itu.

"Kami di Jakarta kita secara spesifik (masih) menghitungkan yang mycoplasma ya," ujar Ani di kantor DPRD DKI Jakarta pada Senin (4/12).

Namun, Ani enggan menjelaskan detail mengenai data anak yang terinfeksi mycoplasma pneumoniae. Dinkes DKI disebut akan membuat keterangan lanjutan terkait temuan anak yang terjangkit penyakit itu.

"Nanti kami akan membuat rilis sendiri ya. Sesuai dengan rilis dari Kemenkes kemarin, itu memang ada peningkatan kasus di China," ucap Ani.

Selama ini, Dinkes DKI Jakarta mendata kasus penyakit infeksi saluran pernapasan

akut (ISPA) sebagai sistem kewaspadaan. "Sama seperti waktu polusi kan kasus ISPA juga terus kami sampaikan. Pada dasarnya kita hanya perlu waspada," ucap Ani.

Dinkes DKI saat ini juga memantau dan meningkatkan sistem pelaporan real time guna mengantisipasi kasus pneumonia pada anak dan dewasa di Jakarta. Pemantauan dilakukan di puskesmas dan 194 rumah sakit untuk mendeteksi penyakit baru dengan pemeriksaan laboratorium. ● yan



UPACARA PEMAKAMAN DONI MONARDO

Jenderal (Purn) TNI Try Sutrisno (kedua kanan) menaruh bunga di atas makam jenazah Mantan Kepala BNPB Letjen (Purn) Doni Monardo saat prosesi pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Senin (4/12). Doni Monardo terakhir menjabat sebagai Ketua Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan TNI AD periode 2021-2026 yang juga dikenal sebagai Ketua Satgas Covid-19 tersebut wafat setelah menjalani perawatan intensif karena sakit di RS Siloam Jakarta.

PELUNCURAN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK

Presiden Jokowi didampingi Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto (kiri) menyerahkan bentuk fisik (security paper) sertifikat tanah elektronik kepada warga saat peluncuran sertifikat tanah elektronik di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/12). Penerapan sertifikat tanah elektronik dinilai menjadi lebih efektif dan efisien dalam pembuatan sertifikat tanah serta dapat mengurangi risiko sertifikat palsu dan melindungi sertifikat dari bencana alam.

Bawaslu DKI Telusuri Kegiatan Gibran Bagi-bagi Susu di CFD Jakarta

JAKARTA (IM) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta tengah mendalami kegiatan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di area CFD Sudirman-Thamrin, Minggu (3/12).

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo mengatakan, tujuannya untuk memastikan apakah kegiatan Gibran membagikan susu kepada warga di CFD termasuk kategori kampanye atau tidak. "Terkait peristiwa tersebut, Bawaslu Jakarta Pusat sedang melakukan penelusuran dan pendalaman," ucap Benny saat dikonfirmasi, Senin (4/12).

Meski membagi-bagikan susu kotak itu masuk dalam program Gibran, namun Benny tak bisa memastikan itu masuk kegiatan kampanye. "Masih ditelusuri Bawaslu Jakarta Pusat," kata Benny. Sebelumnya, Gibran membantah berkampanye di area car free day Jakarta. "Kan tanpa alat peraga kampanye (APK). Kami kan enggak mengajak untuk mencoblos," celetuk Gibran.

Gibran mengaku hanya membagikan susu di lokasi car free day karena ada ban-

di seluruh wilayah Indonesia. Dengan diimplementasikannya Sertifikat Tanah Elektronik maka Hadi Tjahjanto menyatakan pengelolaan pertanahan di Indonesia telah berstandar dunia.

"Hampir seluruh negara, baik di Benua Eropa, Australia, Amerika, dan Asia telah menggunakan Sertifikat Tanah Elektronik. Sehingga, dengan mengimplementasikan Sertifikat Tanah Elektronik pengelolaan pertanahan di Indonesia telah berstandar dunia dan setara dengan negara lainnya," pungkasi Hadi Tjahjanto.

Dalam kesempatan ini, diserahkan Sertifikat Tanah Elektronik kepada tujuh perwakilan masyarakat dan tiga perwakilan instansi pemerintah. Hadir menerima sertifikat tersebut di antaranya Jaksa Agung, ST Burhanuddin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Turut hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus, Tenaga Ahli, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula 150 masyarakat penerima sertifikat dari sejumlah kabupaten/kota dari Jabodetabek. ● ber

Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan, penerapan Sertifikat Tanah Elektronik diberlakukan secara bertahap, mulai dari sertifikasi aset BMN/BMD, Badan Hukum dan BUMN, rumah ibadah, serta masyarakat di 12 Kabupaten/Kota Lengkap dan

Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan, penerapan Sertifikat Tanah Elektronik diberlakukan secara bertahap, mulai dari sertifikasi aset BMN/BMD, Badan Hukum dan BUMN, rumah ibadah, serta masyarakat di 12 Kabupaten/Kota Lengkap dan

Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan, penerapan Sertifikat Tanah Elektronik diberlakukan secara bertahap, mulai dari sertifikasi aset BMN/BMD, Badan Hukum dan BUMN, rumah ibadah, serta masyarakat di 12 Kabupaten/Kota Lengkap dan

Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan, penerapan Sertifikat Tanah Elektronik diberlakukan secara bertahap, mulai dari sertifikasi aset BMN/BMD, Badan Hukum dan BUMN, rumah ibadah, serta masyarakat di 12 Kabupaten/Kota Lengkap dan

"Hampir seluruh negara, baik di Benua Eropa, Australia, Amerika, dan Asia telah menggunakan Sertifikat Tanah Elektronik. Sehingga, dengan mengimplementasikan Sertifikat Tanah Elektronik pengelolaan pertanahan di Indonesia telah berstandar dunia dan setara dengan negara lainnya," pungkasi Hadi Tjahjanto.

Dalam kesempatan ini, diserahkan Sertifikat Tanah Elektronik kepada tujuh perwakilan masyarakat dan tiga perwakilan instansi pemerintah. Hadir menerima sertifikat tersebut di antaranya Jaksa Agung, ST Burhanuddin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Turut hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus, Tenaga Ahli, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula 150 masyarakat penerima sertifikat dari sejumlah kabupaten/kota dari Jabodetabek. ● ber